

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Input

- a. Kebijakan pelaksanaan SP2TP di Dinas Kesehatan Kota Padang mengacu kepada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, namun kebijakan langsung yang dibuat Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan SP2TP berupa *date line* pengumpulan laporan, sanksi dan reward terhadap keterlambatan laporan belum ada.
- b. Sumber Daya Manusia pelaksana SP2TP di setiap puskesmas sudah memiliki koordinator SP2TP, namun merangkap sebagai pemegang program. Semua petugas SP2TP di Puskesmas belum pernah mendapatkan pelatihan berupa pelatihan komputer dan analisis data, yang dapat meningkatkan kompetensi petugas dalam pelaksanaan SP2TP .
- c. Petunjuk Teknis ada di Dinas Kesehatan Kota Padang, tetapi belum didistribusikan dan disosialisasikan ke semua koordinator SP2TP di Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- d. Sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam pelaksanaan SP2TP berupa komputer masih belum mencukupi pada Puskesmas Nanggalo, Anak Air, Subarang Padang dan Bungus. Panduan SP2TP juga belum ada di semua puskesmas yang ada hanya lembar formulir SP2TP.

##### 2. Proses

- a. Perencanaan SP2TP ditingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum pernah dilakukan, sehingga tidak ada rencana kerja Dinas kesehatan ataupun Puskesmas terkait pelaksanaan SP2TP tersebut
- b. Pengorganisasian pelaksanaan SP2TP di Dinas Kesehatan belum ada, sedangkan di Puskesmas sudah yang terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan anggota pelaksana SP2TP
- c. Pencatatan SP2TP di puskesmas masih ada yang tidak lengkap dan pelaporan yang dilakukan oleh koordinator SP2TP di Puskesmas sering terlambat menyerahkannya ke Dinas Kesehatan Kota Padang

- d. Pengawasan belum pernah dilakukan baik di Tingkat Dinas Kesehatan Kota Padang ataupun di Puskesmas

### **3. Output**

Laporan SP2TP yang diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Padang, dari 11 Puskesmas yang diteliti, 4 puskesmas yaitu Puskesmas Nanggalo, Anak Air, Subarang Padang dan Bungus sering mengalami keterlambatan, dan untuk kualitas data yang dihasilkan berdasarkan evaluasi dari Dinas Kesehatan dan didukung dari hasil penelitian diketahui jika data yang diserahkan Puskesmas sering tidak lengkap dan masih sering terjadi kesalahan.

## **B. SARAN**

### **1. Untuk Pimpinan Puskesmas**

- a. Pimpinan memberikan tanggungjawab koordinator SP2TP untuk mengelola program SP2TP saja, tidak lagi memberikan beban kerja rangkap sebagai pemegang program.
- b. Mengusulkan adanya Juknis dan panduan SP2TP ke Dinas Kesehatan Padang.
- c. Dilakukannya monitoring SP2TP setiap bulannya dan evaluasi dilakukan minimal 3 bulan sekali

### **2. Untuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang**

- a. Mengeluarkan kebijakan tertulis terkait aturan dan mekanisme tentang pelaksanaan SP2TP berupa ketentuan *date line* pengumpulan laporan, sanksi dan reward terhadap keterlambatan laporan ke Dinas Kesehatan dari Puskesmas
- b. Mengeluarkan instruksi tentang pengorganisasian SP2TP di Dinas Kesehatan Kota Padang
- c. Melaksanakan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas SP2TP berupa pelatihan komputer dan analisis data.
- d. Melaksanakan pendistribusian dan Sosialisasi Petunjuk Teknis SP2TP
- e. Melakukan monitoring setiap bulannya dan evaluasi tiga bulan sekali terkait pelaksanaan SP2TP di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang